

IMPLIKASI PERUBAHAN BESARAN RESERVE REQUIREMENT TERHADAP SUKU BUNGA KREDIT BANK DAN UANG BEREDAR

Witingsih.Y¹⁾

Abstract

The cooling effort of Indonesian economic is very necessary. This action is specially for declining inflation, downing current account deficit and avoiding speculation in money market. In this case the Central Bank makes new policy that increase the Reserve Requirement (RR) from 3 % to 5 %.

It's very logic if this policy brings about positive as well as negative implications. Therefore the reserve requirement policy must be supported by another instrument.

Pendahuluan

Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter kembali menaikkan Reserve Requirement (RR) dari 3% menjadi 5%, yang diberlakukan mulai 16 April 1997. Dari kenaikan RR menjadi 5%, diperkirakan bisa disedot dana sekitar Rp 5 triliun dari perbankan.

Untuk kepentingan makro, kebijakan memperbesar RR dinilai sangat strategis. Tanpa harus mengeluarkan biaya (seperti biaya bunga SBI/ Sertifikat Bank Indonesia yang harus dibayar BI), Bank Sentral (BI) mampu menyedot jumlah uang beredar cukup besar. Bila total dana masyarakat di perbankan sekitar Rp 253 triliun, maka dana RR (giro wajib minimum) yang terkumpul sedikitnya Rp 12,65 triliun.

Jika digabung dengan piranti moneter Sertifikat Bank Indonesia (SBI) *outstanding* -nya Rp. 12,14 triliun maka dana perbankan yang tersedot ke BI dari dua sumber tersebut (RR dan SBI) sekitar Rp 24,79 triliun.

^{*)} Penulis adalah Asisten Peneliti Muda di P3I Setjen DPR RI, alumnus Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta.

1) Harian Media Indonesia tanggal 16 September 1996.

Tidak seperti RR, bila melalui SBI, BI harus membayar bunga ke perbankan yang kini rata-rata tingkat bunga SBI adalah 13%. Artinya BI harus mengeluarkan biaya sedikitnya Rp 1,57 triliun pertahun untuk membayar bunga SBI kepada perbankan.

Kebijakan penarikan uang beredar diatas, khususnya kenaikan RR dimaksudkan untuk *mendukung upaya pendinginan suhu ekonomi, melalui pengendalian uang beredar.*

Kebijakan tersebut tidak terlalu mengagetkan bagi dunia perbankan namun bagaimanapun juga pasti membawa pengaruh. Bagaimana cara kerja RR dan bagaimana implikasinya terhadap suku bunga kredit dan uang beredar, tulisan ini mencoba menguraikannya.

Metodologi

Metode analisis yang digunakan dalam pembahasan ini adalah analisis deskriptif atau kualitatif yang menggambarkan implikasi perubahan besaran RR terhadap suku bunga kredit perbankan dan uang beredar. Sedangkan data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari publikasi-publikasi Bank Indonesia, buku Infobank, surat kabar, serta kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah *Reserve Requirement*.

Dasar Pemikiran

Persoalan yang dihadapi dalam bidang moneter perbankan umumnya berkisar pada upaya menjaga kestabilan harga melalui indikator tingkat inflasi, jumlah uang beredar, likuiditas perekonomian, kecepatan peredaran uang, pemberian kredit dan sumber dana perbankan, tingkat suku bunga, dan sebagainya.

Dengan mempertimbangkan berbagai kecenderungan ekonomi dan tantangan yang dihadapi, pada tahun 1997/98 otoritas moneter nampaknya akan terus berupaya mengendalikan uang beredar agar kegiatan perekonomian berada dalam batas aman. Dalam kerangka tersebut ditetapkan target ekspansi kredit perbankan sebesar 17%. Selain itu BI akan tetap menggunakan operasi pasar terbuka (OPT) yang ditunjang oleh peningkatan RR menjadi 5% yang mulai diberlakukan pada April 1997, disamping pengetatan ketentuan pinjaman komersial luar negeri (PKLN) perbankan.

Besarnya jumlah uang beredar memang dapat mempengaruhi keseimbangan antara arus uang dan arus barang serta kestabilan harga, bahkan akhirnya dapat mempengaruhi inflasi, nilai tukar rupiah dan defisit transaksi berjalan. Untuk itulah pentingnya pengendalian uang beredar

yang dalam hubungan ini dunia perbankan memainkan peranan penting.

Bank tidak hanya turut serta dalam peredaran uang melalui penyaluran uang untuk tujuan pembayaran-pembayaran, namun bank juga dapat memperbesar atau memperkecil jumlah uang dalam peredaran.

Di satu pihak bank menerima uang dari masyarakat (produsen dan konsumen). Sebagian uang tersebut digunakan untuk alat pembayaran (pembayaran melalui jasa bank), dan sebagian lagi uang tersebut dititipkan di bank dalam berbagai bentuk tabungan. Uang yang ditabung/disimpan pada bank tersebut berarti keluar dari arus uang yang beredar, dan ini menyebabkan berkurangnya uang beredar.

Di lain pihak bank juga menambah uang pada arus uang yang beredar yaitu dengan memberi kredit kepada produsen dan konsumen, juga kepada pemerintah.

Untuk mengetahui bagaimana perbankan dapat mempengaruhi jumlah uang dalam peredaran, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian uang beredar, likuiditas perekonomian dan uang primer.

Pengertian uang²⁾ di Indonesia terdiri dari uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang kertas dan uang logam, dan uang giral adalah saldo rekening bank yang sewaktu-waktu dapat dipakai untuk pembayaran melalui cek, giro atau surat perintah lainnya. Uang kartal dan uang giral ini dalam istilah moneter disebut M1, yang berarti dapat dipakai sebagai alat pembayaran sewaktu-waktu atau setiap saat bila dibutuhkan. M1 inilah yang disebut sebagai uang beredar.

Uang kartal hanya dapat diciptakan oleh Bank Indonesia yaitu dengan mencetak dan mengedarkan uang baru (baik kertas maupun logam). Sedangkan uang giral sebagian berasal dari uang kartal yang dititipkan pada bank sebagai rekening koran atau giro untuk melakukan pembayaran. Namun sebagian besar uang giral diciptakan oleh bank umum dengan memberi kredit.

Selain uang beredar yang setiap saat bisa digunakan sebagai alat pembayaran, juga dikenal jenis uang yang tidak dimaksudkan sebagai alat pembayaran karena ada keterikatan waktu, misalnya deposito berjangka. Deposito dapat diuangkan pada saat jatuh tempo, walaupun tetap dapat diuangkan juga setiap saat bila memang dibutuhkan dengan dikenakan biaya yang ditetapkan bank. Deposito atau simpanan di bank tersebut disebut Uang Kuasi. Berdasarkan laporan tahunan Bank Indonesia mengenai perkembangan moneter, uang kuasi terdiri dari deposito berjangka dan tabungan. Bila uang beredar ditambahkan dengan uang

2) Drs. Hg. Suseno Triyanto Widodo, "Indikator Ekonomi, Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia", hal 47.

kuasi, disebut sebagai Likuiditas Perekonomian (M2).

Disamping uang beredar (M1), Likuiditas Perekonomian (M2), juga perlu diketahui adanya Uang Primer. Uang primer diartikan sebagai uang yang diedarkan pemerintah yang dipegang oleh masyarakat dan perbankan.

Uang primer meliputi uang yang dipegang masyarakat sebagai alat bayar sehari-hari (uang kartal) dan uang serap yang dimiliki bank (uang tunai di bank dan simpanan di Bank Indonesia yaitu RR). Peran perbankan dalam memperbesar jumlah uang beredar nampak pada penciptaan kredit bagi nasabah/debitur.

Penciptaan kredit terjadi melalui permohonan kredit calon debitur kepada bank. Misalnya PT X membuat permohonan kredit kepada bank A sebesar Rp 100 juta. Bila bank A menyetujui permohonan tersebut, biasanya bank A tidak memberikan Rp 100 juta dalam bentuk tunai/cash (uang kartal), tetapi membuka rekening koran untuk perusahaan X dengan cek atau giro. Kemudian PT X berjanji akan mengembalikan pinjaman tersebut plus bunganya pada saat jatuh tempo. Dengan memberikan kredit kepada PT X, bank A memberikan kepada PT X hak untuk melakukan pembayaran dengan cek.

Inilah yang dinamakan penciptaan kredit. Hal ini akan kelihatan pada neraca bank. Dengan memberikan kredit Rp 100 juta kepada PT X, maka perusahaan X menjadi debitur bank A yang dicatat di neraca bank di sisi aktiva. Dan di sisi pasiva dicatat jumlah pinjaman PT X plus bunganya yang akan dibayar pada saat jatuh tempo.

Dari contoh ini terlihat bahwa bank dapat memperbesar jumlah uang (giral) dalam masyarakat melalui pemberian kredit. Kemampuan dan kesediaan bank untuk memberikan kredit mempunyai pengaruh yang besar terhadap jumlah uang beredar, serta terhadap keseimbangan arus uang dan arus barang. Jika terlalu lunak dalam memberikan kredit, jumlah uang mungkin bertambah lebih cepat daripada pertambahan produksi, sehingga timbul bahaya inflasi. Sebaliknya jika bank ketat dalam memberikan kredit, uang beredar akan berkurang, selanjutnya berdampak pada lesunya kegiatan ekonomi.

Oleh karena itu perlu ada pengawasan terhadap kegiatan perbankan ini, jangan sampai perkreditan bank mengacaukan kestabilan harga. Pengawasan ini merupakan tugas pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bank Indonesia, dengan menjaga agar jumlah uang beredar tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit sehingga menunjang usaha pembangunan.

Instrumen BI yang populer digunakan untuk mengendalikan uang beredar adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) dan *Reserve Requirement* (RR). Akhir-akhir ini instrumen

RR mengalami beberapa kali perubahan akibat ada gejala mulai memanasnya suhu ekonomi.

Gambaran tentang besaran RR

Ketentuan Cadangan Wajib Minimum/Giro Wajib Minimum (CWM/GWM) atau Reserve Requirement (RR) adalah suatu instrumen pengendalian moneter yang mewajibkan bank-bank untuk memelihara cadangan (yang saat ini) berupa simpanan giro pada bank sentral sebesar persentase tertentu dari DPK (dana pihak ketiga). RR merupakan instrumen pengendalian moneter yang dapat digunakan untuk memperlambat pertumbuhan uang beredar, khususnya yang berasal dari kredit perbankan.

Sejak pertama kali diberlakukan sampai tahun 1995, nisbah CWM/RR dalam rupiah hanya mengalami perubahan tiga kali, yaitu tahun 1977, 1988, dan 1995. Sedangkan nisbah RR dalam valuta asing mengalami perubahan empat kali yaitu tahun 1974, 1977, 1988, dan 1995. Sebelum tahun 1983 CWM pernah dipatok 30%. Kemudian tahun 1983 diturunkan 15%, dan dengan Pakto 1988 diturunkan lagi 2%. Terakhir pada tahun 1997, RR kembali dinaikkan menjadi 5% (setelah sebelumnya ditetapkan sebesar 3% pada tahun 1996).

Berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan pada tahun 1988, bank wajib memelihara CWM/RR sebesar 2% dari dana pihak ketiga/DPK, yang meliputi giro, simpanan berjangka, tabungan, dan kewajiban lainnya. Kewajiban tersebut berlaku masing-masing bagi DPK dalam rupiah dan valuta asing. Dalam memenuhi ketentuan tersebut bank dapat menempatkan cadangan dalam bentuk kas pada bank yang bersangkutan dan/atau giro pada Bank Indonesia.

Nisbah sebesar 2% tersebut dianggap belum secara optimal membantu pengendalian moneter secara besar-besaran. Untuk itu, sehubungan dengan upaya pencapaian kestabilan moneter dan lebih memantapkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan, maka pada bulan Desember 1995 (mulai diberlakukan pada Februari 1996) CWM/RR dinaikkan menjadi 3% dari DPK dan ditempatkan pada Bank Indonesia sebagai giro wajib minimum/GWM (*statutory reserve*). Selanjutnya, pemeliharaan likuiditas bank dalam bentuk kas bank tidak diatur dan diserahkan sepenuhnya pada masing-masing bank. Perbedaan ketentuan baru dan ketentuan lama tentang RR dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1 : Ketentuan Cadangan Wajib Minimum (CWM)/Reserve Requirement (RR)

No	Keterangan	Ketentuan lama	Ketentuan Februari 1996
1.	Nisbah RR	2%	3%
2.	Komponen cadangan	- giro pada BI - Kas	giro pada BI
3.	Komponen DPK	- giro - simpanan berjangka - tabungan - kewajiban2 lainnya dengan jangka waktu s/d 24 bulan	
4.	Cara perhitungan RR	a. Rata-rata Mingguan b. dihitung oleh bank umum	a. secara harian b. dihitung oleh BI
5.	Laporan bank	a. dibuat oleh masing2 kantor bank ; laporan gabungan dibuat oleh kantor pusatnya b. time lag dua minggu c. jumlah pelapor : 2.462 kantor cabang dan 240 kantor pusat bank umum	a. Hanya dilaporkan oleh kantor pusat bank. Komplikasi laporan kantor cabang-kantor cabang dilakukan oleh kantor pusat bank yang bersangkutan b. <i>time lag</i> enam hari c. jumlah pelapor : 240 kantor pusat bank umum
6.	Sanksi		
	a. - Pelanggaran pemenuhan RR - Pelaksanaan pengenaan sanksi	- 3% perbulan x kekurangan - setelah menerima laporan bank	- 0,1% x kekurangan per hari - secara harian berdasarkan informasi yang ada pada Bank Indonesia
	b. Laporan : - laporan tidak benar - laporan terlambat - koreksi laporan terlambat	- 3% per bulan x seharusnya - Rp. 10.000.000 - Rp 1.000.000	- Rp 250.000 untuk setiap kesalahan setinggi-tingginya Rp 10.000.000 - Rp 2.500.000 per laporan

Sumber : Laporan Tahunan Bank Indonesia 1995/96

Ketentuan baru tersebut memuat beberapa penyempurnaan teknis agar perhitungan Giro Wajib Minimum/RR dapat lebih cepat dan akurat, prosedur menjadi lebih sederhana, dan beban administratif berkurang. Penyempurnaan teknis tersebut meliputi :

- GWM diperhitungkan secara harian, yang semula adalah rata-rata mingguan.
- Perhitungan GWM dilakukan oleh BI sehingga bank tidak perlu melaporkan perhitungannya.
- Pelaporan posisi DPK dilakukan secara langsung (*on-line*) oleh kantor pusat bank yang merupakan laporan gabungan dari seluruh kantor bank yang bersangkutan.
- Untuk memperoleh data yang lebih cepat, penyampaian laporan

- o kepada BI dilakukan selambat-lambatnya enam hari sejak tanggal terakhir masa laporan. Sebelumnya penyampaian laporan oleh kantor-kantor cabang bank dilakukan selambat-lambatnya dua minggu sejak tanggal terakhir masa laporan.
- e. Format laporan disederhanakan.

Tetapi dengan berjalannya waktu ternyata muncul kekhawatiran terhadap ekonomi yang mulai memanas, yang tercermin dari masih tingginya inflasi dan defisit transaksi berjalan yang cenderung terus meningkat. Selain itu, tingginya jumlah kredit yang disalurkan perbankan, mengancam pencapaian target ekspansi kredit 17% tahun 1996. Laporan bulanan BI menyebutkan jumlah kredit yang disalurkan per April 1996 sudah mencapai Rp 248,99 triliun. Jumlah ini naik 24,79% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang Rp 199,529 triliun. Nampaknya kekhawatiran inilah yang menyebabkan BI menaikkan lagi RR dari 3% menjadi 5%.

Implikasi

Pertanyaan yang muncul dari ketentuan RR yang baru ini adalah apa implikasinya (baik positif maupun negatif) bagi perbankan dan perekonomian nasional khususnya suku bunga kredit dan jumlah uang beredar.

Pada dasarnya implikasi positif yang diharapkan akan terjadi adalah : pertama, jumlah uang beredar berkurang atau terkendali sebagai akibat dari terkendalinya ekspansi kredit perbankan. Pengendalian uang beredar tersebut diharapkan akan mendorong upaya menekan laju inflasi. Kedua, kemampuan bank menyalurkan kredit akan berkurang sehingga diharapkan bank akan menyalurkan kredit secara lebih berhati-hati. Artinya pemberian kredit akan lebih selektif. Dengan kata lain, hanya kredit yang mempunyai prospek baik yang akan menerima kredit dari bank.

Pengalaman membuktikan, peningkatan RR dari 2% menjadi 3% yang berlaku sejak Februari 1996, mampu menahan laju pertumbuhan kredit dan likuiditas perekonomian.

Hal itu tercermin dari, setelah dilaksanakannya ketentuan RR (Februari 1996), uang primer (M0) mengalami peningkatan sebesar Rp 4.864 miliar dari bulan sebelumnya sehingga menjadi Rp 29.893 miliar. Sementara itu, APU (angka pengganda uang) M1 turun menjadi 1,81 dibandingkan dengan rata-rata pada tahun 1995, yaitu sebesar 2,02. Hal yang sama terjadi pula pada APU M2 yang turun menjadi 7,63 dibandingkan dengan rata-rata sebesar 8,31 pada tahun 1995. Dengan

perkembangan tersebut, pertumbuhan M1 dan M2 di kemudian hari diharapkan akan menurun secara bertahap sehingga pengendalian moneter, khususnya kredit perbankan, dapat menjadi lebih efektif.

Namun disamping implikasi positif yang diharapkan akan terjadi, muncul pula dampak negatif yang dapat menyertainya. Pertama, tingginya selektivitas kredit cenderung akan terpilihnya calon-calon debitur yang potensial, yang efisien dan usahanya berprospek baik. Hal ini berdampak negatif bagi *pengusaha kecil yang masih cenderung kurang efisien akan makin terpuruk dari kesempatan pembiayaan yang bersumber dari bank. Apalagi akses mereka terhadap dana luar negeri tidak ada.*

Kesulitan jenis pengusaha kecil ini bukan berarti tidak ada jalan keluarnya. Justru mereka dituntut untuk dapat beroperasi lebih efisien. Disamping pemerintah tentunya dituntut juga untuk memberikan bantuan dan penciptaan iklim usaha yang makin kondusif.

Kekhawatiran lain yang muncul dari kenaikan RR adalah kenaikan suku bunga kredit. Alasannya, dengan kenaikan RR otomatis bagi bank akan bertambah dana menganggurnya yaitu minimal 2% (yang berasal dari kenaikan RR dari 3% menjadi 5%). Tambahan biaya dana menganggur ini biasanya akan dibebankan kepada debitur melalui kenaikan suku bunga kredit. Debitur berani meminjam kendati tingkat bunga cukup tinggi, karena harapan bahwa kenaikan harga barang akan cukup untuk menutup bunga pinjaman. Akibatnya kegiatan usaha menjadi sangat mahal, terutama bagi usaha-usaha yang menggantungkan pembiayaan dari perbankan. Dan bagi usaha yang tidak mampu bersaing, kenaikan bunga kredit akan menyebabkan kebangkrutan.

Tetapi kekhawatiran ini agak sulit diterima, mengingat pengalaman selama ini memperlihatkan bahwa, dengan kenaikan RR tidak otomatis akan menaikkan suku bunga kredit secara tajam. Kalaupun ada kenaikan bunga kredit, itu hanya berlaku bagi kredit-kredit tertentu. Namun secara keseluruhan tingkat suku bunga kredit bank masih dalam batas relatif aman, seperti yang nampak pada tabel 2 dibawah ini. Yang nampak menonjol bahwa suku bunga kredit meningkat cukup tajam pada saat *tight money policy*. Dimana pada tahun 1991, setelah pada tahun 1990 pemerintah menarik dana secara besar-besaran melalui SBI, suku bunga kredit melonjak mencapai 25,21% untuk kredit modal kerja dan 20,87% untuk kredit investasi.

Tabel 2
Suku Bunga Bank

Akhir periode	Kredit modal kerja (%)	Kredit investasi (%)
1988	22,3	-
1989	21,82	19,50
1990	20,67	18,95
1991	25,21	20,87
1992	24,05	19,21
1993	20,52	17,06
1994	17,76	14,90
1995	18,40	15,27
1996	19,30	16,39

Sumber : Laporan Mingguan, BI

Bila dikaji lebih dalam, tidak seharusnya bank-bank dengan segera menuntut untuk menaikkan suku bunga kredit begitu mendengar rencana kenaikan RR. Dana yang harus disimpan di Bank Indonesia tersebut memang tidak menghasilkan bunga. Namun perlu diketahui terlebih dulu bagaimana sebenarnya pengaruh kenaikan RR terhadap biaya dana masing-masing bank.

Biasanya perbankan selalu memberikan alasan perlunya kenaikan suku bunga kredit dengan pernyataan *"Kenaikan RR sebesar 2% akan memaksa bank ekstra hati-hati mengelola dananya mengingat dalam prakteknya dana tunai yang harus disiapkan lebih dari 5%. Karena bank juga harus siap uang tunai yang ditempatkan di banknya sendiri. Hal itu secara langsung akan meningkatkan biaya dana, yang selanjutnya akan dibebankan pada debitur melalui kenaikan tingkat bunga kredit"*.

Dari pernyataan tersebut dapat kita evaluasi bahwa alasan tersebut tidak seluruhnya dapat diterima. Kenaikan RR memang menaikkan jumlah dana menganggur sebesar kelebihan/kenaikan tingkat RR-nya, tetapi mengenai dana menganggur akibat dana tunai yang harus disiapkan di banknya sendiri, bukanlah alasan untuk kenaikan tingkat bunga kredit. Sebab walaupun RR tidak dinaikkan, bank harus tetap menyediakan dana tunai di bank untuk operasional sehari-hari. Jadi alasan dengan menambah beban dana tunai yang ditempatkan di bank, berdampak pada seolah-olah beban dana menganggur menjadi besar sekali.

Tetapi itu tidak berarti kenaikan bunga kredit harus dilakukan. Kalaupun sudah melalui perhitungan bisnis ternyata suatu bank perlu menaikkan, tingkat kenaikannya perlu seminimal mungkin. Biaya dana

juga tergantung pada komposisi dana masyarakat yang dimiliki suatu bank. Bila komposisi dana banyak dalam bentuk giro dan tabungan, maka biaya dana yang ditanggung bank relatif kecil, karena rendahnya bunga giro. Sebaliknya, bila dana pihak ketiga mayoritas berbentuk deposito maka beban biayanya tinggi, mengingat suku bunga deposito juga tinggi.

Dengan kata lain, bahwa perhitungan atas alasan perbankan untuk menaikkan suku bunga kredit perlu diteliti oleh Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan di Indonesia. Sebab, masing-masing bank berbeda kondisi struktur dananya. Melalui pengawasan dari BI, perbankan tidak akan menaikkan bunga sekehendak sendiri dengan alasan yang ditambah-tambah.

Kendala Pelaksanaan Kebijakan RR

Upaya menaikkan RR dalam rangka pengendalian ekspansi kredit menghadapi kendala dari sikap perbankan dalam melakukan ekspansi kredit. Dari pengalaman selama ini bank-bank cenderung mengobrol kredit tanpa atau melebihi target RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) sehingga target ekspansi kredit nasional 1995 sebesar 17 % sampai terlampaui menjadi 24 %. Ekspansi kredit bank Swasta Devisa papan atas misalnya, rata-rata melewati ambang batas 23 %. Sementara bank-bank asing lebih berani lagi, yang melampaui batas 32 %. Belum lagi ekspansi bank-bank swasta pendatang baru, yang masih mungkin memamerkan target kreditnya, mengingat kemampuan permodalan dan akumulasi dana pihak ketiga yang berhasil dihimpunnya (lihat tabel 3).

Tabel 3 :
Posisi Kredit Perbankan Rupiah dan Valas
Menurut Kelompok Bank
(dalam milyar rupiah)

	1995				1996			
	1 April	31 Juli	Perubahan		1 April	31 Juli	Perubahan	
			nominal	%			Nominal	%
Bank Persero	81.333	88.152	6.819	8,4	95.619	101.011	5.392	5,6
- Rupiah	68.567	74.902	6.355	9,2	81.299	86.989	5.599	6,9
- Valuta asing	12.766	13.250	484	3,8	14.320	14.113	(207)	1,4
Bank swasta nasional	90.792	97.247	6.455	7,1	116.401	130.697	14.296	12,3
- Rupiah	76.016	81.971	5.955	7,8	96.953	108.889	11.936	12,3
- Valuta asing	14.776	15.276	500	3,4	19.448	21.808	2.360	12,1
Bank Pembangunan Daerah	4.089	4.665	566	13,8	5.201	5.823	622	12,0
- Rupiah	4.072	4.619	547	13,4	5.154	5.777	623	12,1
- Valuta asing	27	46	19	70,4	47	46	(1)	(2,1)
Bank asing dan campuran	19.925	21.700	1.775	8,9	25.202	27.023	1.821	7,2
- Rupiah	8.551	8.840	289	3,4	10.545	10.736	191	1,8
- Valuta asing	11.374	12.860	1.486	13,1	14.657	16.287	1.630	11,1
Total	196.149	211.764	15.615	8,0	242.423	264.554	22.131	9,1
- Rupiah	157.206	170.332	13.126	8,3	193.951	212.300	18.349	9,5
- Valuta asing	38.943	41.432	2.489	6,4	48.472	52.254	3.782	7,8

Sumber : Bank Indonesia.

Jika melihat pada perilaku mengobrol ekspansi kredit itu, nampaknya BI memang perlu lebih tajam meneliti, mengawasi dan menindak bank yang melanggar aturan prudential banking khususnya dalam rangka pemberian kredit.

Kesimpulan

Pada dasarnya, kenaikan RR akan meningkatkan dana menganggur (dana tanpa penghasilan) yang selanjutnya dapat mempengaruhi biaya dana perbankan. Namun dampak dari penambahan biaya dana tersebut terhadap kenaikan suku bunga, secara keseluruhan relatif kecil. Hal ini terbukti dari tabel perkembangan suku bunga kredit secara nasional. Dari tabel tersebut terlihat bahwa kenaikan suku bunga kredit melonjak tajam hanya pada saat diberlakukannya *tight money policy* "Gebrakan Sumarlin" tahun 1990 dan berakibat tingginya suku bunga kredit tahun 1991. Sementara saat terjadi kenaikan RR, tidak diikuti dengan kenaikan bunga yang tajam.

Dengan demikian maka kenaikan RR tidak selalu harus menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan terhadap ancaman kenaikan suku bunga. Namun memang perlu selalu didukung oleh pengawasan dan penindakan yang tegas dari BI, sebab kenaikan suku bunga kredit akan berdampak (negatif) luas pada kegiatan perekonomian nasional.

Selain itu kebijakan RR masih dimungkinkan mengingat piranti SBI dan SBPU terkadang memerlukan dukungan dalam melakukan kontraksi moneter. Apalagi instrumen RR ini merupakan salah satu alat BI dalam mengendalikan uang beredar yang tidak memerlukan biaya bagi BI.

Sementara dengan SBI, BI harus membayar bunga. Bila dibandingkan dengan negara tetangga, kenaikan RR menjadi 5% di Indonesia saat ini masih tergolong kecil, misalnya Malaysia mencapai 17,5%, Singapura 18%, Filipina 15%, dan Thailand 7%. Hal ini membuktikan bahwa instrumen pengendali uang beredar seperti RR ini masih efektif dan diperlukan.

Diakui bahwa kenaikan RR memang bukan satu-satunya alat yang dapat menyembuhkan memanasnya suhu ekonomi, masih perlu dukungan dari instrumen/kebijakan lain. Namun setidaknya melalui kenaikan RR, turut mendorong upaya menekan inflasi melalui pengendalian uang beredar dengan mengendalikan ekspansi kredit perbankan.

Di sisi lain, pengawasan dan penindakan dari BI juga diperlukan terhadap bank yang melanggar ketentuan batas ekspansi kredit, yang pada tahun ini ditetapkan sekitar 17%. Apalagi perbankan pada umumnya masih cenderung untuk mengobral kredit. Anggapan untuk meraih sebanyak-banyaknya keuntungan melalui pemberian kredit sebanyak-banyaknya (daripada dana menganggur) tanpa pertimbangan yang matang, perlu segera diatasi pihak BI.

Walaupun sampai saat ini pendapatan dari kredit masih merupakan pendapatan terbesar dari perbankan pada umumnya, tetapi pengawasan ekspansi kredit perlu mulai dibarengi dengan pencarian sumber-sumber penerimaan diluar penghasilan kredit yaitu melalui *fee based income*.

Penutup

Dalam kerangka makro ekonomi, pengaruh dari penerapan kebijakan di sektor moneter dapat segera dirasakan, sedangkan pengaruh kebijakan di sektor riil paling tidak baru bisa dirasakan beberapa tahun kemudian. Jadi memang instrumen moneter merupakan alat yang bisa digerakkan dengan cepat.

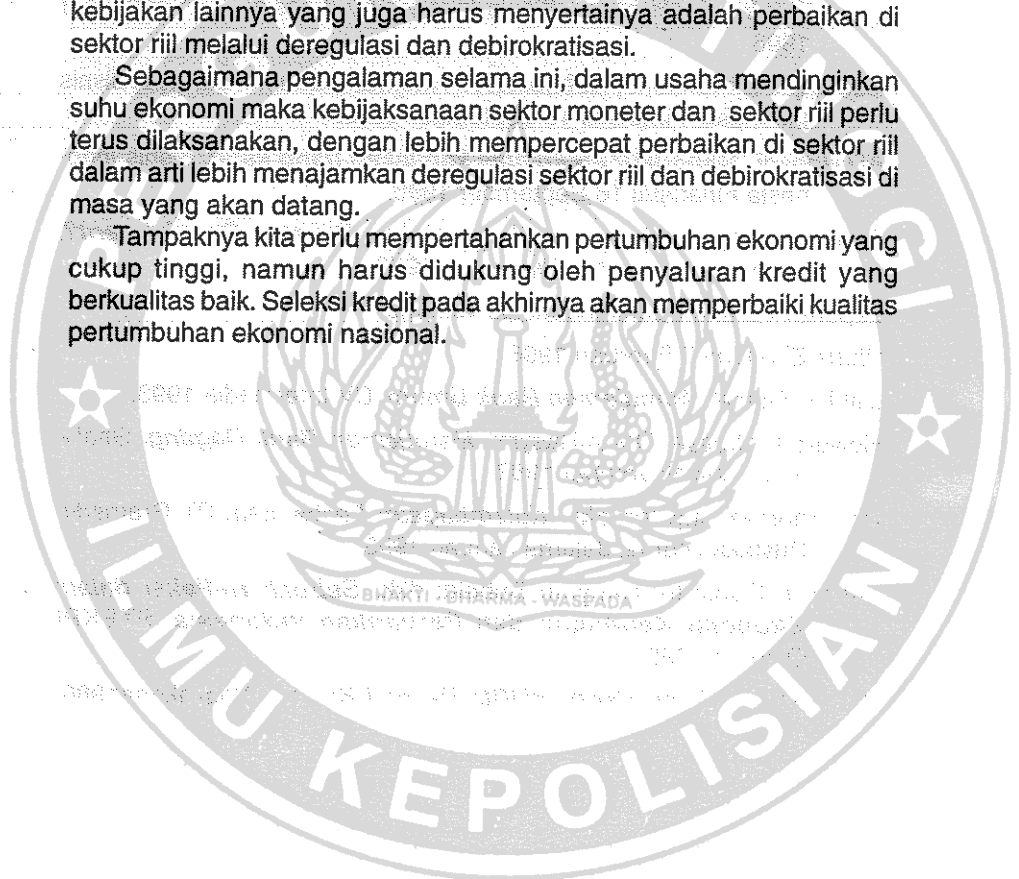
Sampai saat ini pemberlakuan ketentuan RR dalam rangka pembatasan pagu kredit merupakan instrumen yang efektif untuk

mendorong mendinginkan suhu ekonomi, terutama pada saat BI merasa perlu dilakukan tindakan kontraktif tanpa mengeluarkan biaya.

Tanpa mengurangi makna dari instrumen RR tersebut, tampaknya upaya pendinginan ekonomi tetap perlu melibatkan sektor lain. RR hanya merupakan salah satu instrumen moneter yang dapat mendukung upaya pengendalian uang beredar, dengan segala dampaknya. Sementara kebijakan lainnya yang juga harus menyertainya adalah perbaikan di sektor riil melalui deregulasi dan debirokratisasi.

Sebagaimana pengalaman selama ini, dalam usaha mendinginkan suhu ekonomi maka kebijaksanaan sektor moneter dan sektor riil perlu terus dilaksanakan, dengan lebih mempercepat perbaikan di sektor riil dalam arti lebih menajamkan deregulasi sektor riil dan debirokratisasi di masa yang akan datang.

Tampaknya kita perlu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, namun harus didukung oleh penyaluran kredit yang berkualitas baik. Seleksi kredit pada akhirnya akan memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi nasional.



DAFTAR PUSTAKA :

- Susidarto, *Menyoal Kebijakan Cadangan Minimum*, Media Indonesia Keuangan 16 September 1996.
- Faturachman, Djony Edward & Edy Purnomo, *Giro Wajib Mencari Bankir Berkualitas*, Bisnis Indonesia Finansial, 16 September 1996.
- Sudradjad Djwandono, *Kebijakan RR memang ada korbannya*, Bisnis Indonesia Finansial 16 September 1996.
- AD Uphadi, *Mengukur efektivitas kebijakan uang ketat*, Bisnis Indonesia Finansial 16 September 1996.
- Berita Keuangan, *Mengapa BI menaikkan Reserve Requirement?*, Media Indonesia 16 September 1996.
- Laporan Tahunan Bank Indonesia 1995/96
Warta Ekonomi 5 Februari 1996.
- Dahlan Siamat, *Manajemen Bank Umum*, CV Intermedia 1993.
- Howard D.Crosse, Drs.A.Hasymi, *Manajemen Bank Dagang*, Ghalia Indonesia November 1983.
- Drs. Thomas Suyatno dkk, *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Januari 1993.
- Farida K.Ganiarto, Sanyoto Subekti dkk, *Sebuah Refleksi dalam Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia*, STEKPI Oktober 1993.
- Drs.T.Gilarso. *Dunia Ekonomi Kita*, Penerbit Kanisius Yogyakarta 1986.